

DAFTAR BACAAN

Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 7.

Man Suparaman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, PT. alumni, Bandung, 2002, h. 9.

Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 58.

Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia Seri Umum No.10, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, h. 29.

C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.178.

A. Junaedy Ganie, Hukum asuransi Indonesia, Sinar grafika, Jakarta, 2011, h. 84.
Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggung. Djambatan, Jakarta, 1996, h. 103.

Kursus Asuransi Tingkat B Kerugian, Asuransi General Accident, LPAI, 2006, h.5.

Celini tri siwi K, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar grafika, Jakarta, 2009, h. 92-93.

Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, h. 9.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Press, Jakarta, 1986, h. 43.

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, h. 93.

Asha Dayan, Tanggung Jawab PT. Axa Financial Indonesia Terhadap Tertanggung Yang Menderita Sakit Karena Kesengajaan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009.

Gultom, Elfrida, Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional, Raja Grafindo Persada, 2007.

Hartini, Rahayu, Hukum Pengangkutan, Cet.I, UMM, Malang, 2007

Hartono, Sri Rejeki, Asuransi dan Hukum Asuransi Di Indonesia, Semarang IKIP Semarang Press.

Ibrahim, Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 2006

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.

Purba, Radiks, Asuransi Angkutan Laut, Cet.I, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Undang-Undang

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Hukum Perasuransian.

Peraturan Pemerintah (Perpu)

Peraturan Menteri (Permen)